

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh:

Anis Muawanah
NIM. 1402026017

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Rustam DKA. Harahap., M.Ag
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A9 No. 7 Mijen Semarang
Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
Jl. Mega Permai II/40 Bringin Koveri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Anis Muawanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Anis Muawanah
NIM : 1402026017
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas peratiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Rustam DKA. Harahap., M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Kota Semarang 50185
Telp/Fax. (024) 7606405 Web: fs.walisongo.ac.id*

PENGESAHAN

Nama : Anis Muawanah
NIM : 1402026017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF**


Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

23 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 23 Januari 2019

Dewan Penguji,
Ketua Sidang,


MOH. ARIFIN, S.Ag, M.Hum
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang,


RUSTAM, DKAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji I,


Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Penguji II,


Dr. Hj. NAILI ANAFAH, M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I,


RUSTAM, DKAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II,


MOHAMMAD HARUN, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017

MOTTO

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,
jika kamu tidak mengetahui
(An-Nahl:43)*

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Almamater jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang dengan kasih sayang serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
3. Kakak-kakak penulis yang selalu menjadi partner dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah.
4. Teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu serta para pembaca yang budiman.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Deklarator


Anis Muawanah

1402026017

ABSTRAK

Kemajuan zaman yang semakin pesat telah mempengaruhi perkembangan kejahatan menjadi semakin modern dan kompleks. Hal ini berimplikasi pada semakin sulitnya perkara dapat diselesaikan oleh aparaturnya penegak hukum. Karena kejahatan yang terjadi begitu masif sehingga membutuhkan pembuktian yang cukup jeli dengan menghadirkan alat-alat bukti yang dapat memudahkan dalam proses persidangan. Bahkan karena ketidakadanya saksi atau dalam kasus berat, dapat menghadirkan ahli dalam persidangan untuk mencerahkan proses persidangan. Alat bukti berupa keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam tidak disebutkan secara jelas. Lalu dapat atau tidaknya seseorang yang memberi keterangan namun orang tersebut tidak melihat langsung sebuah kejadian menurut Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Kitab *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islami* karangan Abdul Qadir Audah, Kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan KUHAP, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapatkan kaitannya dengan pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang kekuatan pembuktian keterangan Ahli, kemudian menganalisis dan membandingkan di antara kedua sistem hukum tersebut untuk dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat mengetahui bagaimana pembuktian keterangan Ahli dalam peradilan.

Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai kekuatan pembuktian keterangan Ahli. Keterangan Ahli dalam sidang pengadilan menurut Hukum Pidana Positif yaitu dalam bentuk tertulis (alat bukti surat) dan dalam bentuk lisan biasa / alat bukti keterangan ahli. Menurut Hukum Pidana Islam tetap satu

yaitu keterangan ahli. Mengenai syarat menjadi ahli, di dalam Hukum Pidana Islam syarat ahli disamakan dengan syarat saksi meliputi jumlah ahli. Namun dalam Hukum Pidana Positif jumlah ahli itu tidak ditentukan. Keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan interpretasi sedangkan dalam Hukum Pidana Positif berdasarkan keahlian. Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam bersifat mengikat, sedangkan menurut Hukum Pidana Positif tidak mengikat dan dapat dikesampingkan.

Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan *syafa'at*-Nya kelak dihari *Yaumul Qiyyamah*, amin.

Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam penulisannya, suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rustam DKAH, M. Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus selaku Sekertaris Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam dan M. Harun, MH selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam,
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
5. Bapak Maryadi, Ibu Siti Salamah, Supriati, S.H, Tri Adi Mulyono, S.H, Nadya Nur Salim S.Pd dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan

pengorbanan yang telah diberikan baik secara moral atau material.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam Angkatan 2014, Sahabat-sahabat Alvi, Anggita, Alim, Ana, Zulfa, Ana Farokha, Teman-teman PPL PN & PA Salatiga, teman-teman KKN Posko 56 Ds. Tedunan, Kec. Wedung, Kab. Demak, keluarga IMAKE, Keluarga Al-Khidmah UIN Walisongo, Teman-teman di PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo khususnya kamar Al-Asro', Teman-teman YPMI Al-Firdaus khususnya kamar atas, Alumni Ma'had Al-Jami'ah Walisongo angkatan 2014 yang saat susah dan senang selalu saling membantu, semoga persaudaraan tetap terjalin, amin.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 19 Juli 2018
Penulis,

Anis Muawanah
NIM : 1402026017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan.	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metodologi Penelitian	23

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

A. Teori Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	31
1. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam	31

2. Dasar Hukum dalam Hukum Pidana	
Islam	33
3. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum	
Pidana Positif.....	36
4. Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum	
Pidana Positif.....	39
B. Macam-macam Teori Pembuktian	40
1. Menurut Hukum Pidana Islam.....	40
2. Menurut Hukum Pidana Positif	46
C. Macam-macam Alat Bukti.....	50
1. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	50
2. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Positif	57

BAB III Ketentuan Mengenai Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Pidana Islam	77
1. Pengertian Keterangan Ahli	77
2. Dasar Hukum Keterangan Ahli.....	80
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Pidana Positif.....	88
1. Pengertian Keterangan Ahli	88

2. Dasar Hukum Keterangan Ahli.....	101
-------------------------------------	-----

BAB IV Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

A. Persamaan dan Perbedaan Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	109
1. Persamaan	111
2. Perbedaan	119
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Positif menurut Hukum Pidana Islam	134

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	137
B. Saran	139
C. Penutup	140

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki aturan dan norma- norma, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketentraman umat manusia. Kemajuan zaman yang semakin pesat telah mempengaruhi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Semakin maju kejahatan juga semakin modern jenis kejahatan terjadi semakin sulit pula untuk di selesaikan oleh aparaturnya penegak hukum. Banyak jenis kejahatan yang begitu rapih terjadi sehingga membutuhkan pembuktian yang cukup jeli dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sekiranya dapat memudahkan dalam proses persidangan. Bahkan karena ketidak adanya saksi atau dalam kasus berat, dapat menghadirkan ahli dalam persidangan untuk mencerahkan proses persidangan seperti halnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna dengan cara member racun terhadap minuman Mirna dan menimbulkan kematian, dalam kasus ini tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana tindak pidana itu terjadi.¹

¹ Lihat <https://m.liputan6.com/tag/jessicca-kumala-wongso>. Diakses pada hari minggu 04/14/2018 pukul 11:48.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan. Menurut Pilto, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”.² Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.³ Jadi membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan UU untuk memberikan kesalahan yang diberikan kepada terdakwa, sehingga pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan.⁴ Pembuktian merupakan hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2004), hlm. 417.

³ R.Subekti, *Hukum Pembuktian* , (Jakarta: Pranadya Paramita, 1983), hlm. 5.

⁴ Yahya Harahap , *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 252.

kepentingan.⁵ Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan maka hal ini sangat merugikan. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dari seorang hakim dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana. Keberhasilan para aparaturnya penegak hukum tergantung bagaimana mereka dalam pencarian alat bukti yang akurat, hal ini didasari dalam KUHAP pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa pembedaan baru bisa dijatuhkan ketika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu perkara pidana dan perbuatan tersebut benar dilakukan oleh terdakwa. Di dalam Hukum Pidana Positif untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa atau tindak pidana yang telah terjadi selain menggunakan ilmu hukum

⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

⁶ Lihat KUHAP pasal 183.

juga menggunakan disiplin ilmu lain seperti halnya ilmu kedokteran, ilmu psikologi dan juga multi media.

Misalnya dalam beberapa kasus yang disitu tidak ada saksi yang melihat, mendengar atau merasakan secara langsung bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan seperti halnya kasus Jessica dan Mirna. Hal tersebut sangatlah membutuhkan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan menjadikan salah satu alat bukti lain selain pengakuan dari saksi untuk mengungkapkan kasus tindak pidana yang memiliki tujuan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Keterangan Ahli berfungsi sebagai alat bukti yang dapat diajukan didepan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana yang telah terjadi. Alat bukti yang berupa Keterangan Ahli disebutkan didalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Serta dikuatkan dan dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu dalam KUHAP pasal 186 juga diatur tentang Keterangan Ahli yaitu berbunyi :

“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan disidang pengadilan “

Dengan menggunakan pendekatan kedua pasal diatas yaitu pasal 184 dan 186 KUHAP, alat bukti yang berupa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang telah diatur dalam KUHAP. Esensi pokok dari Keterangan Ahli itu sendiri adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya.

Akan tetapi dalam Hukum Pidana Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan Keterangan Ahli. Terkadang terjadinya suatu tindak pidana yang hanya meninggalkan barang bukti lain yang berupa obat-obatan, alat-alat tajam atau senjata tajam, CCTV dan lain sebagainya itu sangat memerlukan adanya keterangan dari seorang ahli yang akan mempermudah jalanya proses persidangan. Menurut Muhammad at-Thoir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.⁷ Pembuktian menurut istilah Arab berasal dari kata “*al- Bayyinah*” yang artinya suatu yang

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 25-26.

menjelaskan.⁸ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis berarti alat-alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.⁹

Sedang pendapat dari Abdul Qadir Audah apabila tindak pidana masuk dalam kategori tindak pidana hudud dimana bukti tindak pidana tersebut adalah kesaksian dari beberapa orang saksi, para saksi diwajibkan melihat sendiri saat tindak pidana itu dilakukan dan melihat pelaku tindak pidana (jani/dader) memperbuat tindak pidana. Dalam hal ini Imam Malik membolehkan saksi hanya dengan mendengar kasus tindak pidana dari orang yang telah melihat secara langsung, berbeda dengan para Imam Madzhab yang tidak membolehkan pemberian saksi dengan cara tersebut.¹⁰

Pengertian Ahli menurut kamus hukum, Ahli adalah orang yang memiliki kemahiran atau kepandaian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan.¹¹ Yang dimaksud kesaksian disini ialah kesaksian mengenai sesuatu yang

⁸ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 207.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *“At Tasyri Al Jinai fi Al Islamy Juz II”*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al A’rabi), hlm. 258.

¹¹ M. Marwan *“Kamus Hukum”* (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm. 22.

khusus diketahui mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan dan kedokteran. Seperti mengenai luka yang terbelah sampai menampakkan tulang dan yang serupa, kemudian obat-obatan yang hanya diketahui oleh para dokter dan obat-obatan hewan yang hanya diketahui oleh para dokter hewan dan lain sebagainya. Maka dalam hal-hal tersebut, kesaksian satu orang ahli dibidangnya dapat diterima, apabila tidak didapati yang selainnya, demikian menurut ketentuan Imam Ahmad.¹²

Adapun kedudukan dan syarat dari keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP).¹³ Berdasarkan keterangan pasal 1 butir 28 KUHP maka dapat ditarik kesimpulanya yaitu ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi ahli yang profesional dan berpengalaman dalam bidang tertentu meskipun tidak memakan pendidikan khusus.

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "*Hukum Acara Peradilan Islam*" (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR 2006), hlm. 227.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*" (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 56.

Keterangan ahli itu sendiri memiliki dua (2) kemungkinan yaitu keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli dan dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan pasal 186 KUHAP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.¹⁴

Pengertian Ahli sendiri dalam bahasa Arab yaitu *الخبراء*, pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.¹⁵ Sedang dasar hukum pengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli sebenarnya telah ada dalam al-qur'an (Q.S An-Nahl) ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - ٤٣ -

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*”, hlm. 56.

¹⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 114-115.

artinya : ”dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”¹⁶

Dan jika mungkin mendatangkan seorang ahli, maka menurut orang-orang yang sepaham dengan saya (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah), tidak diterima tanpa kesaksian dua orang saksi ahli mengacu substansi pembahasan masalah ini, maka dikecualikan kesaksian saksi satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.¹⁷ Jadi berdasarkan keterangan dari Ibnu Qayyim sendiri jika hanya menghadirkan seorang ahli saja tidak cukup, sedang tentang keterangan seorang ahli penelusur jejak sendiri telah dibahas dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم, مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال : ألم ترى أن مجززا المد لحي دخل على فراى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رء و سهما و بدت أقدا مهما, فقال : إن هذه الأ قدام بعضها من بعض

¹⁶ Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid V, (Semarang: Wicaksono), hlm. 387-391.

¹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, “*Hukum Acara Peradilan Islam*”, hlm. 227.

*“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan Nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda :”wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, **“telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain”** (mutafakun ‘alaih)¹⁸*

Hadits diatas menjelaskan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberikan faedah ketetapan nasab, dan Rasulullah merestui kesaksian tersebut.

Dari pendapat diatas jelaslah sudah bahwa adanya keterangan dari seorang ahli yang umum tidak dijelaskan secara mendalam dalam pembuktian diranah Hukum Pidana Islam hanya tentang penelusuran jejak. Yang dijelaskan secara rinci hanya seorang saksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti halnya dalam pembuktian sebuah tindak pidana, baik tindak pidana hudud, takzir, maupun qisas, Hukum Pidana Islam mensyaratkan adanya saksi yang jumlahnya telah ditentukan kalau pembuktiannya tersebut hanya berupa saksi seperti perbuatan zinah yang hanya dapat dibuktikan

¹⁸ Ibnu Hajar Al- ‘Asqolani , *Tarjamahan Bulughul- Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 649.

dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang menyaksikan sendiri terjadinya perbuatan tersebut. Adapun tindak pidana hudud yang lain yakni tindak pidana kisas dan diat, sedikitnya membutuhkan dua orang saksi, sedang dalam tindak pidana takzir hanya diperlukan seorang saksi namun kita ketahui bahwa antara saksi dengan ahli sangatlah jauh berbeda.

Pengaturan keterangan ahli dalam HIR tidak ditegaskan dalam satu pasalpun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat bukti tersebut dua sisi yang berbeda. Perbedaan bukti keterangan saksi dari ahli Syaiful Bakhri (2009: 62-63) memberikan perbedaan kedua alat bukti keterangan saksi dan ahli, sebagai berikut:

- a. Pertama, “subyek” untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan untuk ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- b. Kedua, “isi keterangan”, saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi sementara ahli memberikan “pendapatnya” yang ditanyakan kepadanya.
- c. Ketiga, “segmen dasar keterangan”, keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang

dialami sendiri, keterangan ahli adalah pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.

- d. Keempat, “segi sumpah”, saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan ahli bersumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai pengetahuan atau keahliannya.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah qishas dan diyat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian yaitu: pengakuan, persaksian dan *al-qasamah* (sumpah). Kedua menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Qayyin dari Madzhab Hanbali, untuk pembuktian qishas dan diyat digunakan empat cara (alat) pembuktian yaitu : pengakuan, persaksian, *al-qasamah* dan *qarinah* (indikasi lain) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah hudud. Perbedaan pendapat antar ulama kerap terjadi terhadap alat bukti yang berupa *qarina*.

Ada ketimpang siuran tentang definisi *qarinah* secara rinci dan jelas ini, lalu bagaimana kedudukan pembuktian oleh seorang ahli untuk memperjelas atau sebagai alat bukti lain dalam proses persidangan. Bahkan

¹⁹ H.P. Panggabean, “*Hukum Pembuktian Teori- Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*”, (Bandung: P.T Alumni, 2014), hlm. 90.

Abdullah Ahmed An-Na'im mengutip dari pendapat Abdul Al-Qadir 'Audah menyatakan bahwa “ *Aturan-aturan pembuktian dalam Hukum Pidana Islam mengandung diskriminasi , seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus* ”²⁰

Dengan latar belakang masalah seperti yang dijelaskan diatas, disini penyusun kemudian sangat tertarik untuk meneliti problematika atau permasalahan-permasalahan tentang alat bukti berupa keterangan seorang Ahli dalam pasal 184 KUHAP didalam proses persidangan. Lalu bagaimanapula pandangan kekuatan pembuktian dengan menghadirkan Ahli yang selanjutnya dalam Hukum Pidana Positif itu sendiri disebut sebagai keterangan Ahli menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif itu sendiri, lalu kedua hukum tersebut dikomparasikan. Oleh karenanya penulis menuangkanya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF”**

²⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im , *Deskontruksi Syari'ah ; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan dalam Islam* , alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani , cet ke-2 (Yogyakarta: LKIS1976), hlm. 233.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mengenai pembuktian dengan menghadirkan Ahli?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap Keterangan Ahli dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :
 - a. Mengetahui bagaimana kedudukan pembuktian dengan menghadirkan Ahli dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
 - b. Mengetahui bagaimana perspektif Hukum Pidana Positif terhadap kekuatan pembuktian dengan menghadirkan seorang Ahli.
2. Adapun kegunaan-kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pidana Islam yang berkaitan pembuktian dengan menghadirkan Ahli.
 - b. Secara Praktis

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian oleh keterangan ahli dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, serta bagaimana persamaan dan perbedaannya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kekuatan pembuktian dari seorang ahli dalam ranah peradilan ditinjau dari Hukum Pidana Islam telah dibahas oleh beberapa penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama.

Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Karisma, mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, dengan judul: *“Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Dokter Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri*

Surakarta)” skripsi ini menerangkan tentang tentang kekuatan pembuktian keterangan dokter dalam proses pembuktian perkara pidana di Pengadilan beserta hambatan-hambatan yang muncul dalam kegunaan keterangan dokter sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah bahwa keberadaan Ilmu Kedokteran Kehakiman sangat penting dalam suatu proses pembuktian perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimana keterangan dari dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga kekuatan ilmu kedokteran kehakiman yang digunakan dokter sebagai dasar dalam pemberian keterangan ahli dalam proses pembuktian penyelesaian perkara pidana dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena merupakan salah satu alat bukti sebagai pencapaian kebenaran secara materiil. Keterangan dokter sebagai ahli dan *Visum et Repertum* memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pandangan hakim dalam menilai suatu perbuatan pidana. Namun *Visum et Repertum* dan keterangan dokter sebagai ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah apabila

tidak sejalan dengan alat bukti yang lain, khususnya alat bukti keterangan saksi korban atau keterangan terdakwa.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ari Y, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, dengan judul, “*Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”. Skripsi ini mengkaji tentang peran saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam pembuktian.

Melalui hasil dari penelitian bahwasanya peran saksi dan keterangan ahli sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana, karena, pentingnya alat bukti saksi ini terkait dengan pembuktian yang dianut hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk* (hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya”.

²¹ Karisma, *Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Dokter Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Surakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2011, dalam, <http://eprints.uns.ac.id/4935/1/210751812201103261.pdf>, diakses, 27 februari 2018.

Sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktiannya materiil.²²

Ketiga, skripsi ditulis oleh Auria Patria Dilaga, mahasiswa Uneversitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, dengan judul: “*Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*”. Skripsi ini mengkaji tentang fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, dan kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini adalah fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuaian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, dan kedudukan saksi ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan dalam persidangan

²² Muhammad Ari Y, *Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), dalam http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2_ABSTRAKSI_publikasi.pdf, diakses 27 Februari 2018.

memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh.

Simpulan dalam penelitian ini adalah fakta yang diungkap oleh ahli merupakan opini yang dapat meyakinkan majelis hakim untuk mengungkap kasus, kedudukan ahli dalam tindak pidana korupsi disamaratakan dengan alat bukti yang lain.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahsin Makhrus, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Nomor:03/Pdt.P/2007//PA.Yk)*". skripsi ini mengkaji tentang bagaiman fungsi dan peran saksi dalam pembuktian pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam perkara pengangkatan anak.

Kesimpulan dari jawaban permasalahan tersebut adalah fungsi saksi dalam pembuktian perkara

²³ Auria Patria Dilaga, *Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), dalam, <http://lib.unnes.ac.id/18566/1/8111409077.pdf>, diakses 27 februari 2018.

pengangkatan anak di PA Yogyakarta adalah sebagai seorang yang membuktikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua anak dan anak yang bersangkutan, sedangkan para saksi adalah yang membuktikan faktor-faktor yang menunjang para pemohon itu layak sebagai orang tua angkat. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap fungsi dan peran saksi dalam pembuktian adalah bahwa Islam sangat menghormati dan menjaga hak seorang muslim, sehingga wajib hukumnya untuk para saksi memberikan kesaksian sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai seorang saksi, tentang segala sesuatu yang sedang diperkarakan, mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemohon dan termohon selama mampu menunaikannya tanpa adanya suatu hal yang menimpa, baik pada badanya, kehormatan, harta, maupun keluarganya demi menjaga hak seseorang.²⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Shellanika Ari Astuti, mahasiswi Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum, dengan judul, “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan*

²⁴ Muhammad Ahsin Makhrus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Nomor:03/Pdt.P/2007//PA.Yk)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2008), dalam, <http://digilib.uin-suka.ac.id/2918/1/BAB%201,V.pdf>, diakses 27 februari 2018.

No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt.) skripsi ini menganalisis tentang Keputusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam putusan tindak pidana No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt, dan perlu adanya keterangan ahli kedokteran forensik dalam putusan adalah untuk memperkirakan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam dari pemeriksaan, serta kurang dari 6 jam setelah jenazah ditemukan. Menentukan sebab kematian, yaitu diperkirakan akibat tersumbat jalan nafas. Menentukan sebab kematian, yaitu membiarkan laki-laki yang telah dilahirkan karena bayi yang baru dilahirkan masih dalam keadaan kritis sehingga memerlukan penanganan yang intensif dan serius.²⁵

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Eko Susilowati mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul *Kriteria Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Skripsi ini membahas bagaimana kriteria Ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam

²⁵ Shellanika Ari Astuti *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)*. (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), Dalam http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_14.pdf, diakses 1 MARET 2018.

persidangan, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai alat bukti berupa keterangan Ahli.

Simpulan dari skripsi ini, bahwa Ahli merupakan alat bukti dengan berlandaskan KUHAP pasal 18 ayat (1) huruf b. Kemudian yang dimaksud dengan kriteria Ahli adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan seseorang yang memiliki keahlian atas suatu bidang tertentu.²⁶

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Astuti Hasan yang berjudul *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP*.²⁷ Dalam tulisannya tersebut tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP dan bagaimana pengaruh keterangan ahli sebagai alat bukti, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. KUHAP belum mengatur secara cukup memadai mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP masih terlalu singkat dan terbatas cakupannya.

²⁶ Eko Susilowati, *Kriteria Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2017).

²⁷ Astuti Hasan, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP”, jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Feb/2016.

2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bukanlah sebagai bukti yang sempurna melainkan sebagai bukti bebas (*vrij bewijs*). Hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk tunduk pada apa yang dikemukakan dalam keterangan ahli. Ini sesuai dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Prisco Jaheskiel Umbohyang berjudul *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*.²⁸ Tujuan penulisan jurnal tersebut adalah pentingnya keterangan ahli dalam suatu persidangan untuk mencari titik terang yang tidak bisa dibuat sendiri oleh hakim maupun penyidik .

E. Metode Penelitian

Cara atau metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian demi mencapai hasil yang valid dan konkret dalam menjawab persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang masalah dari penyusunan

²⁸ Prisco Jaheskiel Umboh, *fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Perkara Pidana*, jurnal Lex Crimen, vol. II/No. 2/ Apr-Jun/2003.

teliti. Maka dari itu dibutuhkan langkah kerja dari penelitian. Adapun metode-metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu berupa *kualitatif deskriptif analitik komparasi*,³⁰ yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan menghadirkan seorang ahli dalam persidangan.

²⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Smesta ; 2003), hlm.7.

³⁰ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain yang ada didalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian dengan objek yang telah diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya .(lihat Sudarto: *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis akan dibahas berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, maka data primer yang digunakan adalah kitab *At Tasyri Al Jinai fi Al Islamy* karangan Abdul Qadir Audah dan kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar As-Qalani sebagai data primer Hukum Pidana Islam. Sedangkan yang akan menjadi data primer dari Hukum Pidana Positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (SEJA) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J. A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data

tersebut.³¹ Dengan kata lain data sekunder yang akan menjelaskan data primer yang ada. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan tulisan para ahli hukum yang temanya terkait dengan judul dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

³¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: 2009), hlm. 86.

³² Soejono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Ind Hillco, 2001), Cet V, hlm 13.

Selanjutnya data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif,³³ yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif³⁴ dan deduktif³⁵ guna mendapatkan kesimpulan yang tepat dan relevan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan menghadirkan seorang Ahli sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

6. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu cara pendekatan masalah dengan melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualitasnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca

³³Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat buku Saifiddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 5.

³⁴ Induktif adalah mengumpulkan data - data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

³⁵Deduktif adalah pengumpulan data- data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan ke yang bersifat khusus.

dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dalam bab ini memuat ketentuan teori umum tentang pengertian dan konsep, menjelaskan jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 184 KUHP. Serta memuat definisi, prinsip, landasan dan konsepsi dari kekuatan pembuktian

BAB III : Ketentuan Mengenai Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dalam bab ini

meliputi penjelasan tentang pengertian dasar hukum serta fungsi dari keterangan ahli Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

BAB IV : Analisis Kekuatan Pembuktian Pasal 184 KUHAP Tentang Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Bab ini menerangkan tentang persamaan dan perbedaan penggunaan keterangan dari seorang ahli dalam ranah peradilan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

BAB V : Penutup: Ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan kekuatan pembuktian Keterangan Ahli dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

BAB II

TEORI PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. PENGERTIAN TEORI PEMBUKTIAN

1. Menurut Hukum Pidana Islam

A. Pengertian

Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *al-Bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut Ibnu al-Qayyim, kesaksian hanyalah salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang, menurut beliau *al-bayyinah* adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.¹ Sedangkan menurut jumhur *bayyinah* merupakan sinonim dengan *syahadah* (kesaksian), sedang arti *syahadah* adalah

44. ¹ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.

“keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.²

Saksi dalam bahasa Arab disebut *al-Syhadah*, masdar dari *syahadar* yaitu *al-syuduh* yang berarti *al-hudur* (hadir).³ Secara bahasa berarti berita pemutus, sedangkan secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal ‘kesaksian’ didalam majelis peradilan.⁴ Kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan, jika kewajiban menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan berakibat menghilangkan hak atau kebenaran, memberi kesaksian hukuman *fardhu ‘ain*, seorang saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat memintanya.

Dalam acara dipersidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara

² A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 45.

³ Aris Bintara, *Hukum Acara Peradilan Islam dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 71.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatul*, j-9, cet-4, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 1422/2002), hlm. 6028.

jenis mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercayanya atau palsu. Hal inilah yang akhirnya penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil.

B. Dasar Hukum

Mengenai kewajiban pembuktian ini telah disebutkan dalam beberapa ayat al-qur'an dan hadits diantaranya adalah: ⁵

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu, jika tidak ada dua orang lelaki maka seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi

⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm.74

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

- b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa hatinya..”

- c. Riwayat Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikah dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW.bersabda:

ا لبيثة علي المدعي

“Bukti (harus ada) atas penggugat / pendakwa.”

- d. Hadits Nabi saw. Riwayat Bukhari dan Muslim dari al-‘Asy’asy bin Qais, perkataan Nabi saw. Kepada penggugat:

شا هداك او يمينه

“(datangkan) dua orang saksimu atau sumpahnya.”

- e. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5): 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

“hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia kan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu”

Ayat diatas menjelaskan bilamana seseorang sedang berperkara maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya guna mempermudah jalannya persidangan demi keadilan.

f. Hadits Nabi SAW, yaitu dasar pembuktian:⁶

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وامرأهم ولكننا ليمين
على المدعى عليه

*“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda :
sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang
digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang*

⁶ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 35.

dia kehendeki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat”.

Maksud dari hadits tersebut adalah orang yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Ayat dan hadits diatas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian dalam beracara disertai dengan alat bukti yang mendukung isi pembuktian. Namun dalam Hukum Pidana Islam sendiri tidak menjelaskan bagaimana kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan ahli. Di sini kita ketahui pada pembahasan didalam latar belakang masalah telah disinggung bahwa saksi dan keterangan ahli itu tidaklah sama. Di dalam Hukum Pidana Islam sendiri sedikit dari pendapat para pakar Hukum Pidana Islam adanya keterangan ahli dimasukkan dalam definisi *al-bayyinah* namun tetaplah tidak sama antara ahli dengan saksi.

2. Menurut Hukum Pidana Positif

A. Pengertian

Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, sedangkan pembuktian itu sendiri adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-

acara lainnya dimana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁷

Pembuktian atau membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo, adalah sebagai berikut:⁸

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1. kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
2. kepastian yang di dasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

⁷ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm: 1-2.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke 7*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Cet.I, hlm : 134-136.

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain ialah pembuktian “*historis*” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*.

Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan asas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana (*Presumption of Innocence*), kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting ialah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.⁹

B. Dasar Hukum

Dasar dari teori pembuktian itu sendiri dalam KUHAP pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁹ Retrowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), cet.X, hlm : 60.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”¹⁰

Hal ini diperkuat dengan perintah hukum yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya yang diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa pasal 1865 “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Jadi dapat disimpulkan untuk mencari titik terang dalam suatu perkara diperlukan adanya pembuktian dan dalam pembuktian juga telah diatur hakim baru dapat menjatuhkan sanksi minimal dengan dua alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undang-undang.

B. MACAM-MACAM TEORI PEMBUKTIAN

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak

¹⁰ Lihat KUHAP pasal 183.

kelahiran agama Islam pada abad ke 6 Masehi.¹¹ Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi hukum dalam Islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Hukum Pidana Islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sistem pembuktian dalam Hukum Pidana Islam.¹²

Dalam Hukum Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis,

¹¹Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, *Mengenal Islam For Beginners*, Cet.2 (Bandung: Mizan. 1998). hlm. 12.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006). hlm. 56-58.

dan berdasarkan undang-undang negatif.¹³ Hal ini disebabkan selain karena Hukum Pidana Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ar-Rayu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqaha* atau para alim ulama.¹⁴ Selain itu untuk setiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.

Contohnya dalam kasus tindak pidana/*Jarimah hudud*¹⁵ dan *qisas*¹⁶ dapat dibatalkan hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya hakim memiliki keraguan. Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak berlaku bagi tindak pidana *ta'zir*¹⁷. Contoh lainnya adalah dalam pembuktian

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2001). hlm. 245.

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2007). hlm. 16.

¹⁵ Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam dengan had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah dan menjadi hak Allah SWT, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat), Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 5.

¹⁶ *Qisas* ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 6.

¹⁷ Ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan

kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan *qarinah* (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah (*qasamah*). Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian.

Pada umumnya pada kasus-kasus tindak pidana atau jarimah hudud digunakan alat bukti pengakuan, persaksian, dan *qarinah*. Karenanya dalam pembuktian Hukum Pidana Islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijtihad* beberapa ulama dan fuqaha maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Hukum Pidana Islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (*al-qasamah*), dan petunjuk (*qarinah*).¹⁸ Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas termasuk kedalam *jarimah qisas diyat*.

semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (Hakim). Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam..*

¹⁸ Abd Al-Qadir Audah, *at-tasyri al-jinaiy al-islamiy*, juz II, hlm. 303.

Pandangan pertama, menurut para jumhur ulama, untuk pembuktian *qisas* dan *diyat*¹⁹ dapat digunakan 3 cara alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, dan *al-qasamah*. Sedangkan pendapat kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian jarimah *qisas* dan *diyat* digunakan empat alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian *al-qasamah* (sumpah) dan *qarinah* (petunjuk).²⁰

Dalam hukum acara pidana Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal, yakni:²¹

1. Hakim harus mengetahui gugatan

Al-Da'wa adalah tuntutan/gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.²²

¹⁹ *Diyat* adalah denda (harta yang wajib dikeluarkan karena telah menganiaya atau membunuh). Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

²⁰ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm.44.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm.127.

²² Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, hlm.241.

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

2. Hakim harus mengetahui hukum Allah SWT.

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah jalan mengetahui nash-nash yang *qath'i* (sudah jelas tanpa perlu ditakwilkan) atau *yurisprudensi*²³ secara *ijma'*²⁴. Adapun putusan-

²³*Yurisprudensi* adalah ketetapan hakim terdahulu.

putusan yang berdasarkan *ijtihad*²⁵, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakinkan kebenarannya.

Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya. Dalam hal ini ara fuqaha menetapkan satu kaidah:²⁶ yang mempunyai arti “*apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri*”.

2. Menurut Hukum Pidana Positif

A. Berdasarkan UU secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian ini yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-

²⁴*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu hukum.

²⁵*Ijtihad* adalah mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dihas didalam Al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm.128.

undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁷

B. Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*, teori ini kerap dipakai oleh peradilan juri di Prancis.²⁸

Jadi hakim memutus suatu perkara berdasarkan hati nuraninya dan tidak memerlukan alat bukti lainnya yang telah diatur didalam undang-undang. Sulitnya dalam teori ini yaitu bagi penasihat hukum karena mereka akan lebih sulit untuk melakukan pembelaan.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 251.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 252.

C. Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang.²⁹ Jadi dapat disimpulkan dalam teori ini dan teori sebelumnya sama yaitu hakim memutuskan berdasarkan keyakinan dan pendapatnya sendiri atau sering disebut dengan keindependennya sendiri.

Sedang perbedaannya didalam pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian berdasarkan undang-undang dan dalam teori pembuktian hakim bersifat melulu tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang.

D. Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconvication Raisonnee*)

Sebagai pengambilan jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim

²⁹Andi Sofyan Dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014), hlm.235.

dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.³⁰

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm 253.

C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI

1. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Berikut adalah jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam Hukum Pidana Islam:

a. Pengakuan (*Iqrar*)

Yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia peradilan Islam adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa depan yang akan datang. Apabila seseorang telah mengaku di hadapan sidang pengadilan bahwa rumah yang dikuasai oleh fulan adalah milik orang lain, dan di masa mendatang rumah tersebut oleh pengaku tersebut, terkenallah dirinya akibat pengakuannya sendiri.

Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang bisu atau sulit bicara. Menurut mazhab Hanafi, kasus selain zina pembuktiannya dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan *syubhat* atau (perserupaan). Sebab, isyarat dapat menimbulkan paham yang berbeda-beda sehingga menimbulkan *syubhat* dalam menjatuhkan putusan. Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian pengikut Maliki. Orang yang tidak

mengalami kesulitan untuk berbicara, tidak dibenarkan menggunakan isyarat kecuali dalam beberapa hal, pengakuan yang menyangkut sengketa nasab dalam kasus ini adalah hal-hal yang perlu dijaga tidak seperti penjagaan terhadap kasus lainnya.

Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagi *fuqaha* tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyabuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapus. Pendapat yang masyhur dari Syafi'i dan Maliki, tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tulisan dapat dipalsukan. Al-Khashaf meriwayatkan dari Abu Hanifah (sebagai berikut): “apabila hakim telah mendapat data dan data tersebut tidak dihafal, seperti tentang (bukti) pengakuan seseorang atas sesuatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hafal maka ia tidak boleh memutus perkara tersebut selama belum ingat dan tidak ada saksi yang menguatkan.” Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, apabila hakim telah memperoleh data tentang kesaksian atau pengakuan atas suatu hak yang dipersengketakan, padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal data-data maka ia boleh memutus dasar catatan

yang ia miliki sebab tidak semua (data) dihafal oleh hakim.³¹

Alasan Islam menolak tulisan sebagai alat bukti adalah karena adanya kekhawatiran pemalsuan dan penghapusan. Sedangkan pengakuan secara tertulis yang diajukan di depan sidang dengan tidak ada pihak yang keberatan dan telah dapat diterima maka hal itu dapat menjadi alat bukti. Menurut Ibnu al-Qayyim: Allah telah menciptakan tulisan masing-masing orang berbeda antara tulisan yang satu dengan yang lainnya sebagaimana perbedaan bentuk yang satu dengan bentuk lainnya, dan memang inilah dasar pengetahuan ahli tentang tulisan dan perbedaan antara satu macam tulisan dengan lainnya.³²

b. Persaksian (*Syahadah*)

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah *Asy-syahadah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut :³³

a) Pernyataan atau pemberian yang pasti

³¹ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M.,(Surabaya:Bina Ilmu,1982), hlm.94.

³² A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm.42.

³³ Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui <http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html>. diakses pada 4/17/2018.

- b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Sedangkan menurut syara' ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah/kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah SWT ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.

Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian Hukum Pidana Islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu jarimah. Contohnya dalam kasus jarimah zina sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Qur'an yang mengharuskan adanya empat orang saksi yang melihat langsung kejadian untuk membuktikan suatu jarimah zina. Apabila empat orang saksi ini tidak bisa dihadirkan maka gugurlah tuduhan zina terhadap tersangka.

d. Sumpah (*Qasamah*)

Sumpah menurut bahasa Hukum Pidana Islam disebut *al-yamin* atau *al-hiff* tetapi kata *al-yamin* yang lebih umum dipakai. Sebenarnya lafadz *al yamin* bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Sudikno Mertokusumo ialah *suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya*. Sedangkan dalam lingkup

pidana Islam sumpah disebut dengan *Qasamah* yang menurut bahasa artinya baik dan indah dan bisa juga dikatakan sumpah. Sedangkan menurut syara' digunakan pada sumpah dengan Allah.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *qasamah* adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.³⁴

e. Penolakan Sumpah (*Nukul*)

Penolakan sumpah atau *nukul* berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya.³⁵ Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2005). hlm.235.

³⁵ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm.53.

Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Demikian pula pendapat Utsman bin Affan dan *qadhi* Syuraih. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Utsman berkata kepada Abdullah bin Umar “bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba itu dalam keadaan sehat” Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya oleh Utsman.³⁶

Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu, dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.

f. Petunjuk (*Qarinah*)

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “*Qarinah* adalah setiap

³⁶ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, hlm.113.

tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.³⁷

Contoh salah satu bentuk dari *qarinah* adalah hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau alkohol pada mulut seseorang dalam *jarimah* meminum minuman keras. Terwujudnya *qarinah* ini harus memenuhi beberapa hal yaitu terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Selanjutnya adalah terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.

2. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Positif

KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Di dalam teori pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.224.

dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut :³⁸

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
- b. *Reability*³⁹
- c. *Necessity*⁴⁰
- d. *Relevance*⁴¹

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Berikut penulis akan menjelaskan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada

³⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, hlm: 4.

³⁹ *Reability* yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (tidak palsu). Lihat Kamus Hukum.

⁴⁰ *Necessity* yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. lihat kamus hukum.

⁴¹ *Relevance* yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Lihat kamus hukum.

umunya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴²

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam pasal 185 KUHAP, berbunyi:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

⁴² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm.17.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁴³

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

⁴³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm.18.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.⁴⁴

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut psycophat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.⁴⁵

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Petisi*, hlm.29.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, hlm.258-259..

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (pasal 185 ayat (1)), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.⁴⁶

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan

⁴⁶Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm.35.

pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu*⁴⁷ atau *hearsay evidence*⁴⁸ patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain. Andi Hamzah, dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

⁴⁷*De auditu* adalah keterangan atau pernyataan saksi yang dinyatakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain ; keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain. (M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* , Hlm 154).

⁴⁸*Hearsay evidence* adalah pembuktian berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh tidak langsung dari keterangan lisan atau tertulis orang lain atau dari barang bukti lainnya.

Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”. Menurut D. Simons: “Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah

dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.⁴⁹

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm.237.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, membuat pengertian :⁵⁰

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang”

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm 298.

demikian untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- a. Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan

keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Menurut Yahya Harahap ada dua kelompok ahli :⁵¹

- (1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- (2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm.300.

pemeriksaan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵²

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang
 Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila

⁵² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, hlm.42.

pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan.

Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau visum et repertum tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan

ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.⁵³

M. Yahya Harahap, menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.⁵⁴

c. Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁵⁵ Menurut I. Rubini dan

⁵³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, hlm.42.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm.239.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm:71.

Chaidir Ali (Taufiqul Hulam, 2002:63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai

suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁵⁶

d. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut :⁵⁷

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan Saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan Terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm.241.

⁵⁷ Lihat KUHAP.

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut⁵⁸:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdkwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keteranga terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

⁵⁸ Lihat KUHAP.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan.⁵⁹ Keterangan terdakwa memang sangat perlu untuk didengar karena hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, dan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terdakwa menberlakukan tindak pidana. Hal ini dapat menjadi pertimbangan di dalam memberikan sanksi.

⁵⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm:273.

BAB III

KETENTUAN MENGENAI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Telah disinggung sebelumnya sedikit tentang Ahli menurut Hukum Pidana Islam didalam latar belakang masalah. Ahli sendiri dalam bahasa Arab yaitu الخبير، pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.¹

Namun dalam acara persidangan Hukum Pidana Islam jarang sekali menggunakan kata الخبير yang lebih sering menggunakan kata *al-bayyinah*. Menurut Ibnu al-Qayyim, *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.²

¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*. hlm 114-115.

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm : 44.

Tidak dibenarkan bahwa pengertian dari *al-bayyinah* itu sendiri sebagai dua orang saksi. Jadi menurut Ibnu Qayyim apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran dimuka persidangan dapat disebut sebagai *al-bayyinah*. Karena definisi dari *al-bayyinah* itu sendiri sangat luas bahkan didalam al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan bahwa arti dari *al-bayyinah* itu 2 saksi melainkan *al-hujjah*.³ Jadi dari penjelasan diatas hemat penulis, apa saja baik itu berupa benda maupun keterangan dari seseorang yang disampaikan dalam persidangan digunakan untuk mengungkapkan suatu perkara maka dapat dianggap sebagai *al-bayyinah*.

Menurut jumhur ulama, *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* (kesaksian), sedang arti *syahadah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu dapat pula dimasukkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib memenuhi, kecuali terhadap

³*Hujjah* adalah dasar hukum atau landasan alasan..

perkara yang mengandung *syubhat*⁴ karena firman Allah SWT⁵:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“.....*Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka itu dipanggil.....*” (Q.S.al-Baqarah (2):282)

Maksud keterangan ayat diatas adalah kesaksian boleh dari siapapun dengan syarat orang tersebut dapat dipercaya, meskipun dia hanya mendengar atau tidak melihat langsung peristiwa yang telah terjadi, yang terpenting orang tersebut dapat dipercaya, kesaksian tersebut disampaikan dimuka persidangan dan dimintai lafal kesaksian.

Dalam bukunya Ibnu Qayyim pernah menyinggung tentang pendapat dari Imam Malik yaitu tentang diperbolehkannya kesaksian yang hanya dari mendengar. Dapat diimplementasikan kedalam paham hukum modern yaitu berkaitan orang yang hanya mendengar dan dimintai kesaksiannya seperti halnya seorang ahli. Seorang ahli dimintai keterangannya atau kesaksiannya hanya dengan menyampaikanapa yang ia pahami, tidak melihat secara langsung suatu

⁴ Syubhat adalah masih samar-samar hukumnya.

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm 45.

kejadian itu terjadi, karena itu sudah beda ruang pembahasan untuk orang yang telah melihat kejadian secara langsung serta dimintai keterangannya yang biasa disebut dengan saksi. Sedang penjelasan dari ayat diatas adalah ketentuan terhadap saksi dilarang untuk menolak jika dimintai kesaksiannya sebab untuk mencari terang suatu masalah, karena sebaik-baik persaksian ialah dia yang memberikan kesaksian adil dengan tanpa diminta.

2. Dasar Hukum dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

a. Dasar Hukum

Sedang dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli sebenarnya telah ada dalam Q.S An-Nahl ayat 16:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

”Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang

*mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”*⁶

Dari ayat diatas dapat ditarik benang merahnya yaitu *فا سألوا أهل الذكر*, “bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan” untuk mencari titik terang suatu masalah. Adanya ayat ini sangat membantu sekali dalam dunia peradilan dalam proses pembuktian karena tidak selamanya jarimah atau tindak pidana mudah untuk diselsaikan hanya dengan bukti-bukti ada tanpa adanya keterangan ahli. Meskipun didalam ayat tersebut menyebutkan orang tersebut haruslah laki-laki karena peradilan Islam sangat mengutamakan kesaksian dari orang laki-laki dibandingkan dengan perempuan namun dalam pembahasan ini tidak akan menyinggung sama sekali tentang kekuatan pembuktian dari keterangan yang disampaikan baik oleh orang laki-laki maupun perempuan.

Kembali pada pembahasan ayat diatas, disisi lain tidak semua orang menguasai segala bidang ilmu, maka ada sebutan “ahli” yaitu orang yang memiliki keahlian khusus dibidang tertentu meskipun tidak dibatasi dengan pendidikan bisa jadi orang tersebut

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, hlm 116-117.

memiliki keahlian khusus karena bekal dari turun temurun keluarga atau belajar secara *autodidak*.⁷ Yang terpenting orang tersebut memiliki kemampuan yang lebih dibidang yang berkaitan dengan perkara.

Menurut Ibnu Qayyim dan jika mungkin mendatangkan seorang ahli, tidak diterima tanpa kesaksian dua orang saksi ahli mengacu substansi pembahasan masalah ini, maka dikecualikan kesaksian saksi satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.⁸ Jadi berdasarkan keterangan dari Ibnu Qayyim sendiri jika hanya menghadirkan seorang ahli saja tidak cukup, harus menghadirkan alat bukti lain minimal dua alat bukti karena dianggapnya kurang kuat. Namun persaksian tentang keterangan seorang ahli penelusur jejak sendiri sebenarnya telah dibahas dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم، مسرورا ترق أسارير وجهه. فقال : ألم ترى أن مجزرا المد لجى دخل على فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا

⁷*Autodidak*: orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri, Lihat KBBI.

⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm.227.

رء و سهما و بد ت أقدا مهما, فقال : إن هذه الأ أقدا م بعضها
من بعض

*“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan Nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda :”wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, **“telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain”**.”⁹*

b. Kekuatan Pembuktian

Dalam Hukum Pidana Islam sendiri sebenarnya tentang keterangan ahli tidak pernah dibahas secara rinci bahkan dalam penyebutan yang murni membahas apa itu keterangan ahli. Namun disini penulis merealisasikan kejadian-kejadian yang pernah ada dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam peradilan Islam.

Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, keterangan ahli sudah ada namun lebih tepatnya

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif* .hlm 115-116. Mengutip didalam kitab *Bulughul Maram*.

keterangan ahli penelusuran jejak dalam perkara asal-usul anak. Karena pada saat itu belum berkembangnya ilmu kedokteran, maka tidak ada yang nama tes DNA. Seperti hadits dibawah ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم, مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال : ألم ترى أن مجززا المدلجى دخل على فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رء وسهما وبدت أقدامهما, فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض

“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda:”wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, “telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain”¹⁰.

Dari hadits diatas banyak para ulama berbeda pendapat:

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*.hlm 115-116.

- Berdasarkan hadits di atas juga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah kegembiraan atas kabar yang disampaikan berdasarkan temuan penelusuran jejak. Kegembiraan itu merupakan pengakuan beliau dan beliau pun merestui kesaksiannya, sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan merestuinnya.¹¹ Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa menyelesaikan perkara dengan menghadirkan ahli sebagai alat bukti lain dalam bidang tertentu itu telah digunakan serta dibolehkan sejak pada zaman Rasulullah SAW dan merupakan terapan hukum pada peradilan masa sahabat-sahabat yang datang sesudahnya. Mereka yang menerapkan ketentuan hukum semacam ini dalam perkara asal-usul anak, diantaranya ialah Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik.

Tidak ada seorang sahabatpun yang menentang terapan hukum acara pembuktian seperti ini dalam kasus tersebut. Sedang dari

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm : 367.

kalangan *tabi'in*¹² yang menerapkan ketentuan ini diantaranya ialah Said bin Al-Musayyab, Ata' bin Abu Rabah, Al-Zuhri, Iyas bin Muawiyah, Qatadah, dan Ka'ab bin Suwar. Kemudian, dari kalangan *tabi'it tabi'in*¹³ diantaranya ialah Al-Laits bin Saad, Malik bin Anas dan pengikut-pengikutnya. Kemudian, mereka yang datang sesudahnya diantaranya ialah Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, Ishak, Abu Tsur dan seluruh ahli zahir.

- Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, penerapan ketentuan ini merupakan interpretasi atas dasar serupaan belaka, dimana keserupaan itu kadang terjadi pada diri dua orang asing dan kadang sama sekali tidak dijumpai adanya keserupaan pada diri dua orang yang terjalin kekerabatan.¹⁴
- Menurut Ibnu Qayyim dan jika mungkin mendatangkan seorang ahli, tidak diterima tanpa kesaksian dua orang saksi ahli mengacu substansi

¹²*Tabi'in* adalah orang-orang yang paling dekat dan kenal dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW.

¹³*Tabi'it Tabi'in* adalah pengikut *Tabi'in*, yakni orang islam yang teman sepergaulan dengan para *Tabi'in*, namun tidak mengalami masa hidup sahabat Nabis Muhammad SAW.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm : 366.

pembahasan masalah ini, maka dikecualikan kesaksian saksi satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.¹⁵ Seperti telah dijelaskan sebelumnya kedudukan ahli dan saksi menurut Ibnu Qayim itu setara kecuali ketentuan-ketentuan tertentu, maka menghadirkan ahli tidak cukup satu ahli karena hal itu dianggap cukup kurang kuat untuk hal pembuktian.

Secara global, ketentuan pembuktian keterangan ahli menelusuri jejak merupakan pendapat mayoritas ulama. Ahli penelusur jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. Demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari kesamaan dan perbedaannya maupun dari segi sifat-sifat mana yang telah diturunkannya dan mana yang terhapus.¹⁶

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm .227

¹⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm .385

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Keterangan Ahli

Ahli secara umum dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ahli memiliki dua definisi yakni :

*“ah-li In orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian); orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, 2 a mahir benar: **dia seorang yang – menjalankan mesin itu**; 3 a sangat tekun dan gemar melaksanakan suatu kewajiban, 4 n pangkat dalam jabatan atau tugas fungsional”*.¹⁷

Dalam Collins *Encyclopedia and Dictionary*, expert (ahli) diartikan sebagai *tought by use, practice, or experience having a facility from practice, adroit, dexterous, skilful* (ahli buah pikiran yang berasal dari praktek atau pengalaman, diperoleh dari kesempatan praktek, ketangkasan, kecekatan, kepandaian).¹⁸ Definisi

¹⁷ Lihat KBBI.

¹⁸ Collin & Collin. *Double Book Encyclopedia & Dictionary*, (London. 1968), hal. 185.

ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan atau keahlian seorang ahli tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, melainkan juga dapat diperoleh dari pengalaman dan praktik. Menurut A. S. Hornby dalam kamus *An English-Reader's Dictionary* menyatakan bahwa *expert* (ahli) *person with special knowledge, skill, or training*.¹⁹ Dari peralihan bahasa diatas dapat dipahami bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang khusus, atau kemahiran tertentu.

W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan dua pengertian mengenai ahli, yaitu :

- a. Orang yang mahir atau paham sekali pada suatu ilmu (pengetahuan, kepandaian); misalnya ahli bahasa.
- b. Tenaga ahli diartikan sebagai orang (pekerja yang mahir dalam suatu pekerjaan. Dan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).²⁰

Menurut Handoko Tjondroputranto di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:

¹⁹ A. S. Hornby and E.C. Parnwell. *An English-Reader's Dictionary*(Jakarta. 1961), hal. 149.

²⁰ W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta. 1976), hal. 19.

- a. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulis tangan.
- b. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
- c. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama, Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan

keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.²¹

Didalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- b. Menurut pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.²² Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan keterangan bahwa, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut

²¹ Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, hlm 4-5.

²² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, hlm.245.

diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP terlihat bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam rumusan di atas telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang permintaan keterangan ahli kepada:

- Ahli kedokteran kehakiman;
- Dokter;
- Ahli lainnya.

- c. Pasal 133 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat, di mana dalam ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 133 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan

dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Penjelasan pasal: keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Selanjutnya dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa, mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilacak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

- d. Pasal 180 KUHAP terdiri dari 4 (empat) ayat, di mana dalam ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa, dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu

dilakukan penelitian ulang. Selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (3) KUHAP: Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (ayat 3). Selanjutnya Pasal 180 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Namun pasal diatas tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli. Menurut A. Karim Nasution janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu.²³ Lebih jelasnya Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan,

²³ A. Karim, Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, II, tanpa penerbit, (Jakarta:, 1976). hlm. 136.

ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.²⁴

Pengertian ahli menurut *California Evidence Code* (Syaiful Bakhri, 2009:63) keterangan yang diberikan saksi juga memiliki pengetahuan keahlian, pengalaman latihan atau pendidikan khusus yang memadai, untuk memenuhi syarat seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.²⁵ Pendapat ini membatasi tentang pendidikan seorang ahli, hal ini tidak ada salahnya, karena memang seorang ahli haruslah memiliki pengetahuan yang lebih dalam suatu bidang dari seorang saksi khususnya bagi dokter ahli kehakiman atau dokter.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti, berikut penjelasan setiap pasalnya :

²⁴<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>. Diakses Tanggal 28 April 2018.

²⁵ P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, hlm.88 .

1. Pasal 1 angka 28 KUHP

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 KUHP, M. Yahya Harahap membuat pengertian:²⁶

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli

²⁶ Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm :298.

ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- a. Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya

(Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap ada dua kelompok ahli:²⁷

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan. Jadi dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Ada dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis dan lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat ini biasanya

²⁷ Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm :300.

dituang dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam pasal 187 huruf c KUHAP, berbunyi bahwa surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁸

Mengenai *visum et repertum*, Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.²⁹ Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, hlm.42.

²⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 98.

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. ”Ayat (2) menyatakan “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Maka, yang dijelaskan pada pasal 133 adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yaitu *visum et repertum*.

Dalam bukunya, Soeparmono mengatakan, kedudukan *visum et repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

- a. Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187 huruf c KUHAP);
- b. Keterangan ahli (Pasal 1. Stb 1937-350 jo. 184 ayat (1) huruf b KUHAP).³⁰

Adapun kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan disebut keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan hakim. Keterangan itu dapat juga diberikan

³⁰ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, hlm 142.

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (186 KUHAP).³¹ Jadi dapat disimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan diatas ahli dalam menyampaikan keterangan dapat dibedakan menjadi dua yang pertama disebut keterangan ahli dan kedua dapat disebut dengan surat.

2. Dasar Hukum dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

A. Dasar Hukum

Keterangan ahli sangat diperlukan untuk mengkolaborasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persidangan guna membuatterang suatu perkara. Keterangan ahli dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum.

Ladasan hukum dari keterangan ahli diataur dalam KUHAP, dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 butir 28 KUHAP³²: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebenarnya keterangan ahli tidak hanya di

³¹ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm: 91.

³² Lihat KUHAP

acara pidana saja bisa juga didalam acara perdata, acara tata usaha dan lain-lain.

Pasal 120 KUHAP³³, pasal ini menerangkan tentang pemeriksaan ahli dimuka penyidikan, meskipun dihadapan muka penyidik seorang ahli juga perlu mengangkat atau mengucapkan janji. Dalam hal penyidikan ahli juga memiliki hak tolak (*versehoningsrecht*) bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia.

Pasal 133 KUHAP dan pasal 179 KUHAP, didalam pasal 179 KUHAP menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang ahli itu sama halnya dengan saksi

Pasal 184 ayat (1) huruf b : menjelaskan macam-macam alat bukti dalam persidangan, tata urutan alat-alat bukti pada pasal 184 KUHAP bukan berarti yang pertama disebut itu lebih kuat melain semuanya adalah satu kesatuan yang saling menguatkan.

Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi :

“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”

Syarat sah keterangan ahli: keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, menurut pengetahuan dalam bidang

³³Lihat KUHAP

keahlian, diberikan dibawah sumpah/janji baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim dalam bentuk keterangan disidang pengadilan. Jadi dapat diambil kesimpulannya yaitu keterangan ahli adalah seseorang yang meyakini keahlian dia dalam sidang pengadilan dan disumpah / janji. Jadi jika keterangannya disampaikan di tahap penyidikan itu tidak dapat disebut sebagai keterangan ahli melainkan surat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat

bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau visum et repertum tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembukti.³⁴

M. Yahya Harahap, menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, hlm.42.

mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.³⁵

B. Kekuatan Pembuktian

Nilai kekuatan pembuktian oleh keterangan ahli sebagai berikut :

- Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
- Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

Lebih tepatnya berdasarkan KUHAP³⁶:

- 1) Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
- 2) Suatu keterangan baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- 3) Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, hlm.239.

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Petisi*, hlm.60-61.

nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

- 4) Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah :
 - a. Karena sudah disandera, dan tetaptidak mau bersumpah
 - b. Tidak hadir dan ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu
 - c. Maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.
- 5) Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban:
 - a. datang dipersidangan
 - b. mengucapkan sumpah
 - c. memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 6) Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.
- 7) Kekuatan berupa alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk

menemukan kebenaran, dan hakim bebas untuk menggunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

- 8) Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.
- 9) Apabila dibandingkan dengan ilmu management, keterangan ahli adalah sama atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam menyampaikan pendapatnya dalam persidangan harus memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

BAB IV

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Diuraikan lebih jauh oleh Philipus M. Hadjon menggunakan pendekatan perbandingan hukum membantu menemukan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang lebih cocok yang melandasi suatu norma hukum atau lebih.¹ Pendekatan perbandingan terdiri atas perbandingan yang bersifat :

- a. *Macro comparision* : perbandingan mendalam dalam suatu kajian
- b. *Micro comparasion* : perbandingan yang hanya dilakukan di permukaan saja

Dalam penellitian hukum normatif ternyata pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Law*) yang lebih tepat untuk mengkaji suatu persamaan hukum.pada penelitian Ilmu Hukum bukanlah persoalan data, melainkan persoalan norma yang merupakan objek dari ilmu hukum.

Perbandingan hukum secara Istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut:

¹ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : Genta Publishing), hlm. 48.

1. Comperative Law (bahasa Inggris)
2. Vergleichende Rechtslehre (bahasa Belanda)
3. Droit Compre (bahasa Perancis)

Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau perselisihan hukum yang artinya menjadi lain dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Tujuan dari adanya perbandingan hukum menurut J. F. Nijboer seperti yang dikutip Andi Hamzah adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan yang terdiri dari doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum, tujuan politik hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, putusan hakim, tujuan praktis untuk pembaharuankerjasama internasional yang lebih baik.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti masalah hukum yang terkait, dengan membandingkan antara sistem hukum Nasional atau biasa disebut Hukum Pidana Positif dengan sistem Hukum Pidana Islam untuk mendapatkan pemecahan masalah dan mengetahui hukum pembuktian, bagaimana kekuatan dalam pembuktian di ranah peradilan dengan menggunakan keterangan ahli didalam dunia Islam.

A. Persamaan dan Perbedaan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Persamaan

Mengenai persamaan di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif yang *pertama*, persamaan dari segi pengertian, jadi akan dijelaskan pada titik mana saja persamaan dalam mendefinisikan pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tidak jauh berbeda. Menurut Hukum Pidana Islam pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Menurut Hukum Pidana Positif, pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya dimana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Dapat diambil kesimpulan persamaan dari pengertian pembuktian didalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif yaitu sama-sama mencari bukti kebenaran pada peristiwa yang telah terjadi.

Persamaan yang *kedua*, dilihat dari jenis-jenis alat bukti dalam pembuktian menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif banyak kesamaannya. Alat bukti

didalam Hukum Pidana Islam ada yang berupa sumpah / *qasam* / *Al-Yamin*. Didalam Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Al-Yamin* yang artinya kekuatan. Menurut ahli fiqih sumpah (yamin) ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucappkan dengan nama Alloh SWT, bahwa ucapan itu benar dengan dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Alloh dan percaya siapa yang memberikan keterangan yang tidak benarkan memperoleh siksaanNya.² Fuqaha juga sepakat bahwa seorang harus bersumpah dengan bentuk sumpah sumpah yang pasti dan tegas, baik itu untuk menetapkan dan mengukuhkan maupun untuk menafikan dan menyangkal karena ia adalah yang mengetahui keadaan dirinya dengan sebenarnya.³

Didalam Hukum Pidana Positif sendiri juga mengenal istilah sumpah, namun sumpah didalam Hukum Pidana Positif sangat jauh berbeda penggunaannya seperti didalam Hukum Pidana Islam. Sumpah menurut Hukum Pidana Positif bukanlah sebagai alat bukti namun semua yang dimintai keterangannya baik berupa saksi maupun ahli harus dimintai sumpah jika tidak mau disumpah maka harus berjanji. Hal ini telah diataur didalam pasal 76

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, hlm. 99-100

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, hlm. 408

KUHAP. Pengambilan sumpah didalam Hukum Pidana Positif berfungsi agar orang tersebut yang dimintai kesaksiannya untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, jika ketahuan berbohong maka akan dianggap sebagai *keterangan palsu*⁴ dan merusak citra kepercayaan.

Ketiga, alasan mengenai dihadirkannya ahli dalam ranah persidangan pasti memiliki alasan-alasan. Hadirnya ahli dalam Hukum Pidana Islam maupun positif tidak serta merta ahli datang tidak dengan suka rela namun ia dihadirkan untuk dimintai keterangan.

Dasar hukum menghadirkan ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif juga sama-sama memiliki landasan atau dasar hukum diperbolehkannya pembuktian dengan menghadirkan ahli. Dasar Hukum Pidana Islam:

a. (Q.S An-Nahl) ayat 16:⁵

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

⁴ Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, sedang keterangan atas sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang sudah disumpah. Selain merusak citra kepercayaan keterangan palsu juga terdapat ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP khususnya ayat (1) dan ayat (2) tentang memberi keterangan diatas sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu atau keterangan palsu. Kedua ayat tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

⁵ *Al-Qur'an Quds* hlm 269

b. Hadits Rasulullah SAW, yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال : ألم ترى أن مجززا المدلجى دخل على فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدا مهما، فقال : إن هذه الأقدام بعضها

من بعض

“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan Nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda :”wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, “telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain” (Mutafakun ‘alaih)⁷

Dasar hukum kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam Hukum Pidana Positif diatur didalam KUHAP pasal 184 ayat 2, pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Pasal 133 KUHAP dan pasal

⁶ Yang artinya : ”dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Positif*, hlm 115-116

179 KUHP, didalam pasal 179 KUHP menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang ahli itu sama halnya dengan saksi.

Unsur yang terkandung dari keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam, dikutip dari pendapat Ibnu Qayyim, ahli menelusuri jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. Demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari kesamaan dan perbedaannya maupun dari segi sifat-sifat mana yang telah diturunkannya dan mana yang terhapus.⁸ Dalam Hukum Pidana Positif syarat sah Keterangan Ahli : keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, menurut pengetahuan dalam bidang keahlian, diberikan dibawah sumpah / janji baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim dalam bentuk keterangan disidang pengadilan.

Keempat, dari segi sejarah penetapan Hukum Pidana Islam, pada masa Rasulullah SAW tentang peristiwa yang pembuktiannya memerlukan pembuktian berupa keterangan dari seseorang yang orang tersebut tidak melihat, baik merasakan maupun mendengar langsung dari suatu peristiwa, karena pada saat itu peristiwa tentang

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm

penetapan asal-usul anak penetapan siapa ayah dari anak tersebut lalu bagaimana dalam pembagian hak warisnya.

Saat itu orang yang menyampaikan keterangannya yang berupa penalaran dan pencarian bukti-bukti lain disebut dengan ahli penelusur jejak namun jika dilihat dari keterangan orang tersebut memiliki kesamaan alat bukti berupa keterangan ahli yang didalam Hukum Pidana Positif diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu sama-sama menyampaikan pendapatnya sesuai keahliannya atau kemampuannya guna mencari titik terang sebuah masalah serta orang tersebut bukanlah saksi atau dapat dimaksud adalah orang yang menyaksikan melihat langsung sesuatu itu terjadi sesuai dengan pengertian saksi didalam Hukum Pidana Positif itu sendiri.

Hemat penulis dari peristiwa di zaman Rasulullah SAW yaitu berupa peristiwa asal-usul anak sama kasusnya dengan pembuktian dengan tes DNA untuk menetapkan nasab. Hanya saja pada zaman dahulu alat-alat kedokteran belum ditemukan dan belum begitu canggih seperti saat ini.

Adapun persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap kekuatan pembuktian berupa keterangan ahli telah penulis simpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1.1 Tabel Persamaan Keterangan Ahli

Persamaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
Pengertian	Menurut Hukum Pidana Islam pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).	Menurut Hukum Pidana Positif, pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya dimana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan

		itu.
Pengambilan Sumpah	<i>Qasam</i> / <i>al – yamin</i> / sumpah dalam Hukum Pidana Islam digunakan untuk menyatakan dan menegaskan bahwa keterangannya adalah benar dan apabila keterangan tidak benar maka akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT.	Sumpah dalam Hukum Pidana Positif bukan merupakan alat bukti, namun baik saksi maupun ahli dalam menyampaikan keterangan harus dibarengi dengan sumpah / janji. Dengan adanya sumpah maka keterangannya memiliki kekuatan hukum.
Dasar Hukum	Didalam Hukum Pidana Islam keterangan ahli juga memiliki dasar hukum. Pertama surat An-Nahl ayat 16 dan	Dasar hukum keterangan ahli dalam Hukum Pidana Positif yaitu pasal 184 dan 186 KUHAP

	Hadits Rasulullah SAW tentang keterangan ahli penelusur jejak	
Contoh Peristiwa	Zaman Rasulullah SAW serta para penerusnya dan para ulama dalam kasus asal-usul anak	Pada zaman sekarang pembuktian berupa tes DNA untuk menyatakan nasab

2. Perbedaan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keterangan ahli, sebaiknya kita menyinggung terlebih dahulu sedikit dari perbedaan alat bukti dalam perspektif Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif tentang pembuktian. Banyak alat bukti dalam pembuktian yang berbeda antara hukumpidana Islam maupun Hukum Pidana Positif.

Pertama, yaitu berupa pembuktian dengan menghadirkan seorang ahli dalam lingkup Hukum Pidana Positif, keterangan ahli disinilah yang akan menjadi pokok pembahasan bagaimana perbedaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif jika dihadapkannya ahli dalam acara pembuktian. Ahli sebagai alat bukti yang sah

telah diatur dalam KUHAP pasal 184 ayat 2. Ada dua cara seorang ahli dalam memberikan keterangannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis dan lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat ini biasanya dituang dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam pasal 187 huruf c KUHAP, berbunyi bahwa surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan.

Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama visum et repertum. Laporan atau visum et repertum tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau visum et repertum sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan disebut keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan hakim. Keterangan itu dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

umum yang dituangkan dalam suatu laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (186 KUHAP). Jadi dapat disimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan diatas ahli dalam menyampaikan keterangan dapat dibedakan menjadi dua yang pertama disebut keterangan ahli dan kedua dapat disebut dengan surat.

Dengan demikian dari keterangan ahli itu sendiri telah menghasilkan dua alat bukti yang berbeda yang pertama berupa alat bukti surat dan yang kedua berupa keterangan ahli itu sendiri, dari kedua alat bukti tersebut jika disamakan dengan alat bukti didalam Hukum Pidana Islampun tetap menjadi dua alat bukti yang berbeda.

Mengenai alat bukti keterangan ahli yang dalam bentuk tulisan berupa alat bukti surat, didalam Hukum Pidana Islam alat bukti surat masuk didalam kategori alat bukti berupa qarinah, definisi Qarinah atau petunjuk menurut Wahbah Zuhaili adalah “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Karena dalam Hukum Pidana Islam alat bukti surat sebagai petunjuk lain tidak disebutkan sama sekali, namun devinisi dari qarinah juga mencakup pengertian yang sangat luas yaitu segala macam petunjuk, maka keterangan ahli dalam bentuk tulisan atau termasuk alat bukti surat

sebagai petunjuk dalam hukum pidana dapat masuk kedalam kategori tersebut.

Mengenai keterangan ahli itu sendiri, keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam juga tidak disebutkan. Keterangan ahli dalam Hukum Pidana Positif dapat disimpulkan yaitu keterangan atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus namun dia tidak melihat langsung kejadian karena dalam Hukum Pidana Positif ahli dengan saksi adalah dua hal yang sangat jauh berbeda, pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Maksudnya apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Alat bukti dalam Hukum Pidana Islam yang memiliki definisi yang sama dengan definisi saksi maupun ahli yaitu alat bukti berupa syahadah atau kesaksian, meskipun definisi dari syahadah atau kesaksian itu sendiri lebih mengacu kepada pengertian alat bukti

yang berupa saksi dalam Hukum Pidana Positif, namun dapat kita analisis dari berbagai definisi lain.

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah Asy-syahadah menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut :

- a. Pernyataan atau pemberian yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Sedangkan menurut syara' ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah / kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.

Kedua, mengenai *nukul* atau penolakan sumpah, alasan dalam Hukum Pidana Islam menggunakan kata *nukul* sebagai alat bukti sedangkan dalam Hukum Pidana Positif sama sekali tidak menggunakan istilah *nukul* atau penolakan sumpah dalam acara pembuktian. Hukum Pidana Islam menggunakan istilah *nukul* atau penolakan

sumpah apabila tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu, dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.

Mungkin sekilas pengertian *nukul* atau penolakan sumpah hampir mirip bahkan membingungkan dengan pengertian *qasamah* atau sumpah dalam Hukum Pidana Islam maupun dalam hukum perdata, jadi secara mudahnya perbedaan *nukul* dengan sumpah, *nukul* yaitu sumpah yang datanganya dari pihak penggugat apabila tergugat atau tersangka tidak mau mengakui perbuatannya tersebut sedangkan *qasamah* yaitu sumpah yang datanganya bisa dari pihak tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah atau sebaliknya datang dari pihak korban atau penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan.

Mengenai penolakan sumpah di dalam Hukum Pidana Positif memiliki sebab lain yang telah diatur dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :

- a. Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.
- b. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah :

- Karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah
- Tidak hadir dan ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu

Maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini jelas sangat berbeda dengan istilah nukul atau penolakan sumpah dalam Hukum Pidana Islam

Ketiga, mengenai perbedaan kekuatan pembuktian dengan menghadirkan ahli dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dapat dianalisis sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian dari keterangan ahli itu sendiri dari mencari terang suatu kasus dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, Rasulullah SAW didalam hadits tersebut mengekspresikan bentuk penerimaan keterangan seorang ahli penelusur jejak sebagai alat bukti untuk mencai terang suatu peristiwa dan hal tersebut diikuti oleh para *Khulafa Ar-Rasyidin*⁹ pada

⁹*Khulafa Ar-Rasyidin* adalah empat orang Khalifah (pemimpin) pertama agama islam, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Empat orang tersebut adalah para sahabat dekat Rasulullah yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya disaat masa keRasullan Muhammad. Keempat Khalifah tersebut dipilih bukan

pengambilan kasus yang serupa. Namun pada abad selanjutnya ada sebagian ulama, diantaranya Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, penerapan ketentuan ini merupakan interpretasi atas dasar serupaan belaka, dimana keserupaan itu kadang terjadi pada diri dua orang asing dan kadang sama sekali tidak dijumpai adanya keserupaan pada diri dua orang yang terjalin kekerabatan.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah menolak pembuktian dengan menghadirkan ahli.

Menurut Ibnu Qayyim dan jika mungkin mendatangkan seorang ahli, tidak diterima tanpa kesaksian dua orang saksi ahli mengacu substansi pembahasan masalah ini, maka dikecualikan kesaksian saksi satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.¹¹ Jadi menurut Ibnu Qayyim sebenarnya menggunakan Ahli untuk mencari terang suatu peristiwa boleh namun Ahli tersebut harus lebih dari satu, karena menurut pendapat beliau kekuatan pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dari Ahli sama halnya dengan

berdasarkan keturunannya melainkan berdasarkan consensus bersama umat muslim (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1)

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm : 366

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* hlm .227

menghadirkan saksi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif tidak menyebutkan jumlah minimal ahli yang dibutuhkan dalam menyampaikan keterangannya.

Perbedaan kekuatan pembuktian lain tentang keterangan ahli dalam Hukum Pidana Positif, berdasarkan KUHAP ¹²:

- a) Suatu keterangan baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam fungsi sumpah telah dijelaskan sebelumnya yaitu meyakinkan siapa yang bersalah sedang dalam Hukum Pidana Positif meyakinkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya.
- b) Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.
- c) Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah :
 - Karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, hlm.60-61

- Tidak hadir dan ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu

Maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini jelas sangat berbeda dengan istilah *nukul* atau penolakan sumpah dalam Hukum Pidana Islam

- d) Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban:
 - datang dipersidangan
 - mengucapkan sumpah
 - memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang kahliannya.
- e) Kekuatan berupa alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas untuk menggunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang

jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

- f) Apabila dibandingkan dengan ilmu management, keterangan ahli adalah sama atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam menyampaikan pendapatnya dalam persidangan harus memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.

Dari semua ketentuan-ketentuan sifat keterangan ahli dalam Hukum Pidana Positif, namun dalam Hukum Pidana Islam tidak menjelaskan bagaimana sifat dari keterangan ahli baik bebas atau mengikat baik itu sebagai keterangan hakim atau bukan karena menurut dasar dari hadits Rasulullah SAW apa yang diterangkan dari ahli penelusur jejak adalah alat bukti yang digunakan untuk memutuskan perkara. Jadi dapat diambil kesimpulannya didalam hadits yang telah menjadi landasan hukum atau dasar hukum tentang ahli penelusur jejak, keterangannya sudah jelas

diterima untuk mencari titik terang suatu perkara tanpa membawa-bawa itu sebagai pendapat hakim atau bukan.

Adapun perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap kekuatan pembuktian berupa keterangan ahli telah penulis simpulkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman sebagai berikut:

1.1 Tabel Perbedaan Keterangan ahli

Perbedaan	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
Pembagian keterangan ahli menurut penyampaian-nya	Ahli dalam menyampaikan keterangannya tidak bisa seperti Hukum Pidana Positif, jadi keterangan ahli adalah keterangan dari seseorang yang ahli. Sedangkan surat sudah masuk didalam kategori <i>al-qarinah</i> .	1. Keterangan ahli itu sendiri 2. Keterangan ahli dalam bentuk tulisan atau sering dikenal dengan alat bukti surat
<i>Nukul</i> atau penolakan sumpah	<i>nukul</i> atau penolakan sumpah apabila tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar	Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah : - Karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah - Tidak hadir dan ketika

	sumpah penggugat itu, dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan	pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu Maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.
Alasan tidak dipakainya keterangan ahli	<p>1. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, penerapan ketentuan ini merupakan interpretasi atas dasar serupaan belaka, dimana keserupaan itu kadang terjadi pada diri dua orang asing dan kadang sama sekali tidak dijumpai adanya keserupaan pada diri dua orang yang terjalin kekerabatan.</p> <p>2. Menurut Ibnu Qayyim dan jika mungkin</p>	Kekuatan berupa alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas untuk menggunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan

	mendatangkan seorang ahli, tidak diterima tanpa kesaksian dua orang saksi ahli	kenyataan yang lain dipersidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.
--	--	---

Setelah menganalisis teori persamaan dan perbedaan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, maka penullis menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari kedua perspektif sebagai berikut :

1.1 Tabel Keterangan Ahli Dalam Hukum Pidana Islam

Keterangan	Kelebihan	Kelemahan
ahli dalam Hukum Pidana Islam	Keterangan ahli (penelusur jejak) sangat berpengaruh dalam menentukan putusan, karena keterangan ahli tersebut dipakai dalam persidangan selanjutnya.	<p>a. Keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam hanya keterangan dari seorang laki-laki yang adil.</p> <p>b. Serta ketentuan jumlah keterangan ahli jika memiliki batas minimal</p> <p>c. Harus disampaikan secara lisan</p>

1.2 Tabel Keterangan Ahli Dalam Hukum Pidana Positif

Keterangan	Kelebihan	Kelemahan
ahli dalam Hukum Pidana Positif	<p>a. Membantu hakim untuk mencari titik terang dalam sebuah kasus</p> <p>b. Keterangan ahli bisa</p>	a. Keterangan ahli dapat diabaikan oleh Hakim

	disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan	
--	---	--

Demikian kelebihan dan kekurangan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif yang dapat penulis paparkan.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Positif menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Hukum Pidana Islam, menghadirkan ahli dalam persidangan diperbolehkan bahkan Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk bertanya pada yang mengetahui dengan berdasarkan pada Q.S An-Nahl ayat 16. Namun adanya Ahli di dalam Hukum Pidana Islam menurut sebagian ulama masih menjadi perdebatan. Sebagian kecil ulama tidak menggunakan Ahli sebagai alat bukti karena dianggapnya hanya sebagai interpretasi (menyamakan) dan sebagian lain menganggap jika mungkin menggunakan Ahli sebagai alat bukti tidak cukup jika hanya menggunakan satu Ahli saja harus minimal dua Ahli. Karena dua Ahli sudah dianggap dua alat bukti.

Keterangan dari seseorang yang tidak melihat kejadian namun hanya berdasarkan kemampuan atau pengetahuan dalam Hukum Pidana Positif masih bisa dikesampingkan bahkan ditolak. Namun hal ini berbeda dengan Hukum Pidana Islam, karena dalam kasus-kasus tertentu keterangan itu bisa langsung diterima dan dijadikan alat bukti yang sah bagi Hakim. Bahkan jika perkara tersebut tentang kebatilan maka orang yang memberikan keterangan diberikan hak penuh atas perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persamaan dan perbedaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mengenai kekuatan pembuktian dengan menghadirkan ahli:
 - a. Persamaan:
 - a) Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu suatu proses untuk mencari suatu kebenaran tentang suatu peristiwa yang telah terjadi dengan menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.
 - b) Keduanya sama-sama memiliki keahlian khusus yang ahli dalam bidangnya.
 - c) Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat.
 - b. Perbedaan:
 - a) Dua cara seorang ahli dalam memberikan keterangannya dalam sidang pengadilan menurut Hukum Pidana Positif yaitu dalam bentuk tertulis terkenal dengan sebutan alat bukti surat dan dalam bentuk lisan biasa disebut dengan alat bukti keterangan ahli itu sendiri. Menurut

Hukum Pidana Islam tetap satu yaitu keterangan ahli.

- b) Mengenai syarat menjadi ahli, di dalam Hukum Pidana Islam syarat ahli disamakan dengan syarat saksi meliputi jumlah ahli. Namun dalam Hukum Pidana Positif jumlah ahli itu tidak ditentukan.
 - c) Seseorang yang memberikan persaksian di dalam Hukum Pidana Islam haruslah adil dan diutamakan laki-laki, sedangkan dalam Hukum Pidana Positif tidak disebutkan apakah harus laki-laki maupun perempuan, adil atau tidak yang penting berkompeten.
 - d) Keterangan Ahli dalam Hukum Pidana Islam bersifat mengikat, sedangkan menurut Hukum Pidana Positif tidak mengikat dan dapat dikesampingkan.
2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum Pidana Positif memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Dengan demikian hakim bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan. Sedang dalam Hukum Pidana Islam hanya dalam kasus tertentu dan keterangan ahli dapat langsung diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan

demikian kedudukan keterangan ahli dalam Hukum Pidana Islam lebih kuat dibandingkan dengan keterangan ahli di dalam Hukum Pidana Positif karena dalam Hukum Pidana Positif keterangan ahli masih bisa dikesampingkan.

B. Saran

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yakni melalui kajian teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki pembahasan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif berdasarkan pendapat-pendapat Imam sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan pendapat para pakar Hukum Pidana Positif. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara dua sumber hukum sebagai bahan kajian bagi pembaca untuk bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana yang lebih lanjut untuk dipahami. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk memberikan bahan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai alat-alat bukti dalam kekuatan pembuktian, khususnya kekuatan pembuktian keterangan ahli.

Adapun maksud penulis pertama, bagi pembaca agar mendapatkan informasi tambahan terkait bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif sehingga

pemahaman yang didapatkan dapat interpretasikan, direnungkan, serta ditularkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat.

C. Penutup

Demikian dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis sadar bahwa baik dalam penulisan maupun penyampain bahasa skripsi ini banyak sekali kekuarangan-kekurangannya, maka penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid V, Semarang: Wicaksono.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar, 2006 ,*Tarjamahan Bulughul-Mahrom*, Bandung: Diponegoro.
- Ali, Mohammad Daud, 2006, *Hukum Islam*, Cet.6 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1422/2002, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatul*, j-9, cet-4, Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, 1976, *Deskontruksi Syari'ah ;Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan dalam Islam* , alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani , cet ke-2, Yogyakarta .LKIS.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1987, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra.

Asis, Abd, Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.

Astuti, Shellanika Ari, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt.)*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), Dalam http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_14.pdf.

Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri Al Jinai fi Al Islamy Juz II*, Beirut: Dar Al-Kitab Al A'rabi'.

Azwar, Saifiddin, 2004, *Metode Penelitian* , cet ke-5 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bintara, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Islam dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dilaga, Auria Patria, 2013, *Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*, (emarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, dalam, <http://lib.unnes.ac.id/18566/1/8111409077.pdf>, diakses 27 februari 2018.

Djalil, A.Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.

Faizal, Fiqih Jinayah, 2012, diakses melalui <http://belajarekonomisyariahfaizlife.blogspot.com/2012/11/fiqh-jinayah.html>.

Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1 Jakarta: Sinar Grafika.

Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*.

Harahap, Yahya, 2000, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan*

Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Astuti, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP”, jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Feb/2016.

[Http://minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html](http://minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html).

[Https://m.liputan6.com/tag/jessicca-kumala-wongso](https://m.liputan6.com/tag/jessicca-kumala-wongso).

Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta.

Karisma, *Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Dokter Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Surakarta: Skripsi Tidak diterbitkan, 2011, dalam, <http://eprints.uns.ac.id/4935/1/210751812201103261.pdf>.

KBBI.

KUHAP.

Lubis, Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Madzkur, Muhammad Salam, 1982, *al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M., Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Makhrus, Muhammad Ahsin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Nomor:03/Pdt.P/2007//PA.Yk)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2008), dalam, <http://digilib.uin-suka.ac.id/2918/1/BAB%201,V.pdf>.
- Malik, Zafar Abbas, Zinudin Sardar, 1998, *Mengenal Islam For Beginners*, Cet.2 Bandung: Mizan.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke 7*, Yogyakarta: Liberty, Cet. I.
- Mudji, Sri , Soejono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Ind Hillco), Cet V.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A. Karim, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, II, tanpa penerbit, Jakarta.

- O, Iskandar, Retrowulan S, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, cet.X.
- P, Jimmy, M. Marwan 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher .
- Panggabean, H.P, 2014, *Hukum Pembuktian Teori- Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.
- PDF. A. S. Hornby and E.C. Parnwell, 1961, *An English-Reader's Dictionary*, Jakarta.
- PDF. Collin & Collin. 1968, *Double Book Encyclopedia & Dictionary*. London.
- Poerwadarminta, W. J. S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rosita, Lily, Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

Soeparmono, R, 2002 *Keterangan Ahli & Visum et-Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti, R, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pranadya Paramita.

Sudarto, 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilowati, Eko, 2017, *Kriteria Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo.

Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1.

Umboh, Prisco Jaheskiel, *fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Perkara Pidana*, jurnal Lex Crimen, vol. 11/No. 2/ Apr-Jun/2003.

Y, Muhammad Ari, *Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), dalam http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2_ABSTRAKSI_publicasi.pdf.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama	: Anis Muawanah
TTL	: Kebumen, 05 Juni 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Golongan Darah	: O
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia (WNI)
No. HP	: 085810991473
E-mail	: anismuawanah2@gmail.com
Alamat Asal	: Ds. Tlogorejo, RT. 01 RW. 02, Dkh. Wonoyoso, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Ayah	: Maryadi
Ibu	: Siti Salamah
Saudara	: Supriati, Tri Adi Mulyono

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tlogorejo Lulus Tahun 2008
2. MTs N Prembun Lulus Tahun 2011
3. MAN 3 Kebumen Lulus Tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang

B. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) UIN Walisongo Semarang
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang
3. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang
4. Keluarga Besar Al- Khidmah UIN Walisongo Semarang